

# Pendapatan Anjlok, Belanja Membengkak

Kondisi APBN yang seret tahun ini menjadi peringatan untuk pemerintahan baru agar berhati-hati mengelola keuangan.

JAKARTA, KOMPAS — Kondisi keuangan negara sedang penuh tantangan. Pemerintah memprediksi penerimaan pajak tahun ini tidak akan mencapai target, sedangkan belanja negara lebih tinggi dari rencana. Akibatnya, deficit anggaran diperkirakan melebar dari 2,29 persen menjadi 2,7 persen dan produk domestik bruto, semakin melebur mendekati batas aman.

Kondisi teradukit keuangan negara itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Senin (9/7/2024). Rapat itu untuk membahas Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I dan Proyeksi Kinerja APBN Semester II Tahun 2024.

Kementerian Keuangan memperkirakan sektor perpajakan sampai akhir tahun 2024 hanya bisa mencapai Rp 2.218,4 triliun atau 96 persen dari target awal APBN 2024 yang sebesar Rp 2.309,9 triliun.

Berhubungan kinerja penerimaan perpajakan seret, pemerintah berharap pada sektor non-pajak untuk mendorong pendapatan negara agar bisa mencapai target 100 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun ini pun diperkirakan bisa mencapai Rp 549,3 triliun atau 111,6 persen dari target APBN.

Pada saat penerimaan negara sulit mencapai target, belanja negara justru membengkak melanggu target di APBN 2024. Kemenkeu memprediksi belanja pemerintah tahun 2024 akan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau 102,6 persen dari target awal yang sebesar Rp 3.325,1 triliun.

## Outlook APBN 2024: Defisit Diperkirakan 2,70% PDB

Lebih tinggi dari target APBN 2024 2,29% PDB  
Utusan (Triliun Rupiah)

	LKPP Audited	APBN	Realisasi Semester I	Outlook	2024		Selisih thd APBN
					% Terhadap APBN	Pertumbuhan (%)	
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>2.783,9</b>	<b>2.802,3</b>	<b>1.320,7</b>	<b>2.802,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>
I. Penerimaan Perpajakan	2.154,2	2.309,9	1.028,0	2.218,4	98,0	3,0	(91,5)
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	612,5	492,0	298,4	549,1	111,6	(10,4)	57,1
III. Penerimaan Hibah	17,2	0,6	4,3	34,9	8.110,3	103,2	34,5
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>3.121,2</b>	<b>3.325,1</b>	<b>1.398,0</b>	<b>3.412,2</b>	<b>102,6</b>	<b>9,3</b>	<b>87,1</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.239,8	2.467,5	997,9	2.558,2	103,7	14,2	90,7
II. Transfer ke Daerah	881,4	857,6	400,1	854,0	99,6	(3,1)	(3,6)
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	<b>102,6</b>	<b>(25,5)</b>	<b>162,7</b>	<b>(110,8)</b>	<b>434,4</b>	<b>(208,0)</b>	<b>(85,3)</b>
<b>D. Defisit Anggaran (A-B)</b>	<b>(337,3)</b>	<b>(522,8)</b>	<b>(77,3)</b>	<b>(609,7)</b>	<b>116,8</b>	<b>80,8</b>	<b>(86,9)</b>
% Defisit terhadap PDB	(1,61)	(2,29)	(0,34)	(2,70)			
<b>E. Pembagian Anggaran</b>	<b>356,7</b>	<b>522,6</b>	<b>168,0</b>	<b>609,7</b>	<b>116,8</b>	<b>71,0</b>	<b>86,9</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

## Terobosan penerimaan

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Dradjad Wiwoho mengatakan, meskipun kinerja fiskal sudah diperkirakan sebelumnya karena kondisi makro yang berpengaruh terhadap penerimaan. Di sisi belanja ada efek "akhir masa jabatan" yang membuat belanja membengkak. Ini karena pemerintah merujuk target capaian pembangunan, seperti IKN.

"Kinerja APBN 2024 ini menjadi peringatan dini bagi pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu peringatan akan semakin beratnya tekanan fiskal. Tekanan ini harus diatasi melalui terobosan penerimaan negara agar tidak mengganggu stabilitas fiskal dan ekonomi makro pada tahun 2025. Terobosan itu harus terjadi pada dua sumber penerimaan sistemik dan *ad hoc*. Keduaanya berlaku pada PPN, PPn, PNBP, bes dan cukai," kata Dradjad yang juga ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI).

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira memilih APBN ada di kondisi yang cukup berat. "Ini menjadi peringatan agar tahun depan harusnya defisit bisa dijaga tetapi di bawah 2,7 persen dari PDII. Pemerintahan baru harus hati-hati karena APBN sedang tidak dalam kondisi yang *healthy*. Perlu dilakukan rasionalisasi program-program yang akan dijalankan," kata Bhima.

Sementara itu, Peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teuku Riefky memiliki penerimaan pajak yang tidak memenuhi target dapat dipahami mengingat tahun ini terjadi deprestasi nilai tukar rupiah.

(AGE)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penerimaan perpajakan memang telah mengalami kontraksi sepanjang semester I-2024 ini.

Penerimaan yang lesu itu disebabkan merosotnya sektor Pajak Penghasilan (PPH) hadan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang terkena dampak penurunan harga komoditas yang cukup tajam.

"Profit mereka turun sangat tajam. Mereka memang masih profit, tetapi tidak setinggi tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, kebutuhan belanja negara masih besar. Kementerian mencatat, sepanjang semester I-2024, pemerintah sudah jor-joran membelanjakan APBN untuk beberapa kebutuhan. Hal itu antara lain berupa pegawai untuk menaikkan

gaji aparatur sipil negara (ASN) dan TNI Polri pada awal tahun 2024.

Selain itu, belanja untuk pelaksanaan pemilihan umum pada Februari 2024 serta program pendidikan dan pelajaran publik. Pemerintah juga menggelestaikan bantuan sosial (bensos) di awal tahun untuk mitigasi dampak El Nino dan perubahan iklim.

## Defisit melebar

Kondisi keuangan negara yang semakin "besar pasak daripada tiang" itu membuat pemerintah melewati target defisit anggaran dari awalnya 2,29 persen menjadi 2,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) alias membengkak Rp 80,8 triliun dari rencana awal Rp 522,8 triliun menjadi Rp 609,7 triliun.

"Jadi, defisit itu adalah kom-

binasi dari pendapatan negara yang terkoreksi dan tidak mencapai target, serta belanja negara yang di sisi lain mengalami growth positif," kata Sri Mulyani.

Untuk menutup defisit dan membayangi kebutuhan belanja yang membesar, Kementerian meminta persepsiuan DPR untuk menambah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) alias "kas cadangan" sebesar Rp 100 triliun di sisa tahun ini. Sebelumnya, dalam APBN 2024, pemerintah merencanakan penggunaan SAL sebesar Rp 51 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, lewat penggunaan SAL, pemerintah tidak akan memerlukan Surat Berharga Negara (SBN) tambahan. "Jadi, meskipun defisit naik, penerimaan SBN tidak perlu naik," kata Sri Mulyani.



